



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 243 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PROAKTIF
PENERIMA PENGHARGAAN
PADA RAPAT KOORDINASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2023**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya penghargaan atas komitmen dan upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola pengadaan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Proaktif Penerima Penghargaan Pada Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PROAKTIF PENERIMA PENGHARGAAN PADA RAPAT KOORDINASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan kriteria penilaian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Proaktif penerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum pada diktum KESATU atas capaiannya dalam tata kelola pengadaan dengan predikat minimal baik pada Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital; dan
3. Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PROAKTIF PENERIMA
PENGHARGAAN PADA RAPAT
KOORDINASI UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2023

NOMOR : 243 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 Mei 2023

KRITERIA PENILAIAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
PROAKTIF PENERIMA PENGHARGAAN PADA RAPAT KOORDINASI UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023

| No. | Kategori Penghargaan | Kriteria Penilaian |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Kementerian | 1. UKPBJ di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang telah mencapai tingkat kematangan Proaktif di Tahun 2022; 2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan tingkat keterisian Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Tahun 2022 yang telah mencapai sekurang-kurangnya 60% dari jumlah kebutuhan; 3. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Tahun 2022 minimal berada dalam kategori Baik (skor ITKP > 70); dan |
| 2. | Lembaga | |
| 3. | Pemerintah Provinsi | |
| 4. | Pemerintah Kabupaten | |
| 5. | Pemerintah Kota | |

| | | |
|--|--|--|
| | | 4. Pimpinan tertinggi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (menteri/kepala lembaga/kepala daerah) tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi perhatian publik. |
|--|--|--|

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PROAKTIF PENERIMA
PENGHARGAAN PADA RAPAT
KOORDINASI UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2023

NOMOR : 243 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 Mei 2023

DAFTAR UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PROAKTIF PENERIMA
PENGHARGAAN PADA RAPAT KOORDINASI UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2023

| No. | Kategori Penghargaan | Nama Instansi |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Kementerian | 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Keuangan |
| 2. | Lembaga | 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Badan Siber dan Sandi Negara |
| 3. | Pemerintah Provinsi | 1. Provinsi Bali 2. Provinsi Kepulauan Riau 3. Provinsi Jawa Barat |
| 4. | Pemerintah Kabupaten | 1. Kabupaten Badung 2. Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Kabupaten Buleleng |
| 5. | Pemerintah Kota | 1. Kota Tangerang 2. Kota Batam |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI